RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

PERWA NO.54 , BD. 2025 / NO.55, PEMKOT PTK: 81 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025–2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025–2029. Peraturan Wali Kota ini mengatur kedudukan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan peraturan daerah. Selain itu, diatur pula pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian, Peraturan Wali Kota ini ditetapkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025; Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 19 September Tahun 2025.

- Penjelasan: - 81 hlm.